

## **PROGRAM KESIAPSIAGAAN KEBAKARAN BERBASIS KOMUNITAS : STUDI DI RW 04 KELURAHAN MANGGARAI – JAKARTA SELATAN**

*Husnul Fitri \**

Husnul Fitri (2008), Program Kesiapsiagaan Kebakaran Berbasis Komunitas : Studi di RW 04 Kelurahan Manggarai – Jakarta Selatan, *Jurnal Sains dan Teknologi Mitigasi Bencana, Vol. 3, No. 1, Tahun 2008*, hal. 62 - 70, 1 gambar, 3 tabel.

**ABSTRAK :** *Fire is one of the common disaster in Indonesia specially in many big cities including capital city of Indonesia, Jakarta. Although it is considered as human error factor and happened incidentally but fire has become a disaster because its effect to many aspect of community life. It also usually happens in high density area with low social-economic status. Thus, this intervention intends to empower vulnerable community against fire hazard Research focus at the aspect of preparedness based on social-cognitive model (Paton, 2006). It is used to elaborate the factors of intention to prepare including critical awareness, sense of community, action coping, and outcome expectancy of the community as the basic to design an intervention in order to develop a proper form of risk communication that match with local community need. Vulnerability and capacity assessment technique is used to obtain the whole picture about community's vulnerabilities and capacities. Intervention strategy was directed to organize community preparedness through local organization and enhance community capacity against fire hazard. Results from this intervention indicate that fire preparedness can be an effective way to improve community capacity. The results also show that intervention succeed to : 1) improve community knowledge about fire preparedness; 2) improve community outcome expectancy through specific behavior change; 3) build local community alertness team ; 4) form non-formal information sharing about fire preparedness within community. These results strengthen previous research stating that the success of community-based fire preparedness intervention program need to pay attention to locality aspect and the participation of community as primary source of support.*

**Keywords :** *fire hazards, preparedness, intention to prepare, risk communication*

### **1. PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

DKI Jakarta merupakan daerah dengan tingkat kejadian kebakaran tertinggi di Indonesia (Suharso, 1999). Hal ini dapat dilihat dengan kestabilan angka kejadian kebakaran tiap tahunnya yang relatif sangat tinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (Gambar 1).

Di sisi lain, peristiwa kebakaran di DKI Jakarta terjadi hampir merata di semua wilayah kotamadya. Menurut Kristantio (2006), semakin tinggi tingkat kepadatan suatu daerah maka semakin tinggi pula potensi terjadinya kebakaran pada daerah tersebut. Faktor ini menyebabkan penduduk di wilayah padat sangat rentan terhadap bahaya kebakaran. Kebakaran berdasarkan objek yang terbakar dapat meliputi berbagai jenis. Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta membagi objek kebakaran menjadi kebakaran bangunan perumahan, kebakaran bangunan umum, kebakaran bangunan industri, kebakaran kendaraan, dan kebakaran lainnya. Namun, untuk kepentingan kegiatan intervensi fokus kebakaran dibatasi pada

---

\* Universitas Indonesia, Kampus UI Depok,  
e-mail : rum1328@yahoo.com



Gambar 1. Frekuensi kejadian kebakaran 10 tahun terakhir  
 Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta (2006)

objek kebakaran pada bangunan perumahan khususnya di wilayah pemukiman padat penduduk.

Secara umum terdapat 53 titik rawan bencana kebakaran di DKI Jakarta yang dihitung berdasarkan frekuensi kejadian kebakaran (frekuensi kejadian lebih dari lima kali di wilayah tersebut). Selain itu, tingkat kerawanan tersebut juga ditentukan oleh karakteristik kerentanan lainnya seperti daerah itu merupakan lokasi yang padat penduduk, bangunan rumah menggunakan bahan sederhana dan mudah terbakar, akses jalan yang sulit dicapai, serta sumber air yang minim (Kompas, 25 Mei 2005, Suharso, 1999). Walaupun seringkali dipandang sebagai peristiwa yang disebabkan oleh kelalaian, namun berbagai dampak yang terjadi serta kompleksitas problem kebakaran telah menjadikan kebakaran sebagai bentuk dari bencana.

Dalam merespon fenomena kebakaran di Jakarta, pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Pemadam Kebakaran pada dasarnya telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi bencana kebakaran ini. Namun, mengingat tingginya tingkat kejadian kebakaran di DKI Jakarta, tentu saja peran serta masyarakat menjadi kunci dalam proses pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Dalam rangka pelaksanaan proses pelibatan masyarakat tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya seperti pembentukan Sistem Ketahanan Lingkungan terhadap bahaya Kebakaran (SKLK), pelatihan tenaga Barisan Sukarela Kebakaran (BALAKAR), dan penyuluhan langsung (dalam Kristantio, 2006).

Namun, efektivitas program-program tersebut masih memerlukan penelitian. Hal ini terjadi karena tidak adanya evaluasi terhadap program tersebut dan

arahan umum/master plan mengenai kelanjutan dari program yang telah dijalankan (Kristantio, 2006). Akibatnya, aspek sustainabilitas dan pemberdayaan komunitas kurang dirasakan sehingga manfaat jangka panjang seperti stabilitas ketahanan lingkungan masih belum tercapai. Strother & Buchbinder (1980) menyatakan bahwa program edukasi kebakaran publik akan berhasil dengan baik jika direncanakan dengan memperhatikan dua hal. Pertama, program dirancang dengan memperhatikan permasalahan kebakaran lokal. Kedua, program tersebut melibatkan komunitas dalam merencanakan dan mengimplementasikan program. Hal ini menunjukkan faktor keterlibatan aktif komunitas merupakan prasyarat dalam membangun program yang efektif.

Berdasarkan penelitian Kristantio (2006) tentang peran serta masyarakat dalam menanggulangi kebakaran dapat disimpulkan bahwa partisipasi aktif masyarakat merupakan aspek penting dalam menukseskan program penanggulangan kebakaran. Dengan demikian, program berbasis komunitas adalah salah satu solusi yang perlu diutamakan dalam memecahkan permasalahan kebakaran di Jakarta. Untuk itu, perlu dipilih fokus dan prioritas program intervensi dengan memperhatikan kompleksitas maupun lokalitas masalah. Kompleksitas permasalahan dapat dilihat dari berbagai kerentanan yang terjadi di komunitas. Masalah kebakaran tidak dapat dipandang sebagai aspek perilaku saja tapi juga terkait aspek fisik, ekonomi, dan sosial di masyarakat. Perubahan perilaku yang memperhatikan keselamatan diri dan lingkungan tidak dapat terjadi secara langsung namun membutuhkan dukungan dari sisi lain seperti aspek ekonomi maupun sosial. Berbagai penelitian tentang program penanggulangan kebakaran yang dilakukan di Amerika Serikat (antara lain oleh Fahy & Norton, 1989; Gunther, 1981; Karter & Donner, 1978; Munson, 1976 dalam McConnel, Dwyer, & Leeming, 1996) menunjukkan bahwa masyarakat miskin memiliki risiko lebih besar mengalami kejadian kebakaran. Hal ini terjadi karena minimnya fasilitas untuk menanggulangi kebakaran serta sumber daya lainnya yang mendukung perubahan perilaku.

Lokalitas masalah juga perlu menjadi perhatian dalam merencanakan program intervensi. Penelitian Strother & Buchbinder (1980) terhadap berbagai program edukasi kebakaran di Amerika Serikat menyimpulkan bahwa problem kebakaran perlu difokuskan pada problem lokal yang spesifik dan melibatkan komunitas dalam perencanaan program tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satu

program intervensi yang dapat berlaku secara umum untuk semua golongan masyarakat. Program intervensi yang tepat harus disesuaikan dengan kondisi komunitas yang menjadi target intervensi.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas maka dapat diasumsikan bahwa tidak ada strategi dan program yang dapat menghasilkan perubahan secara instan. Oleh karena itu, peneliti memilih untuk memfokuskan permasalahan pada aspek kesiapsiagaan komunitas dalam menghadapi bahaya kebakaran. Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa dalam rangka pengurangan risiko kebakaran suatu wilayah maka salah satu program yang dapat dilakukan adalah dengan membangun kesiapan (*preparedness*) masyarakat dalam menghadapi bahaya tersebut. Di sisi lain, aktivitas preventif dan mitigasi membutuhkan perubahan-perubahan mendasar dalam masyarakat baik dari sisi perilaku, ekonomi, dan fisik. Sementara itu, bahaya kebakaran dapat senantiasa terjadi setiap saat sehingga prioritas jangka pendek dapat dilakukan melalui upaya-upaya mempersiapkan masyarakat terhadap bahaya kebakaran.

Kesiapsiagaan merujuk pada setiap kegiatan yang dilakukan untuk menghentikan bencana dan menghindari efek yang membahayakan komunitas dari suatu bencana (Carter, 1991). Menurut Smith (1996) proses tersebut merupakan bentuk penyesuaian manusia terhadap bahaya yang mengancam kehidupan. Aktivitas dalam level ini mencakup keseluruhan kegiatan yang ditujukan untuk mengurangi kerugian dengan menyesuaikan manusia terhadap bahaya.

Menurut Paton (2003) aktivitas kesiapsiagaan terhadap bahaya dan bencana merupakan hal yang penting untuk mengurangi risiko kerugian. Kesiapsiagaan juga dapat memfasilitasi kemampuan untuk melakukan coping secara darurat ketika terjadi bahaya. Hal ini dapat membantu tingkat resiliensi individu terhadap bahaya tertentu. Smith (1996) berpendapat bahwa kesiapsiagaan dapat ditingkatkan dengan memberikan informasi dan pengetahuan pada masyarakat tentang bahaya yang terjadi. Namun, dalam kenyataannya, hal tersebut ternyata tidak meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya (Ballantyne et al, 2000; Duval & Mullis, 1999; Lindell & Whitney, 2000; McClure et al, 1999 dalam Paton, 2003; Hurnen & McClure, 1997).

Paton (2003) kemudian mengembangkan model teoritik untuk menjelaskan faktor-faktor yang berperan dalam kesiapsiagaan. Menurut Paton (2003) model ini merupakan konseptualisasi yang dapat diimplementasikan untuk kepentingan strategi

pengurangan risiko. Paton, Kelly, & Doherty (2006) kemudian mengujicobakan hipotesis tersebut terhadap problem bahaya kebakaran. Dengan menggunakan faktor-faktor yang terdapat dalam model kognitif-sosial tentang kesiapsiagaan, Paton, Kelly, & Doherty (2006) menemukan bahwa dalam bahaya kebakaran faktor *critical awareness*, *outcome expectancy*, *sense of community*, dan *action coping* merupakan prediktor yang signifikan terhadap intensi untuk melakukan kesiapsiagaan. Hal ini tidak terjadi pada faktor *self-efficacy* dan persepsi terhadap risiko.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa *critical awareness*, *outcome expectancy*, *sense of community*, dan *action coping* merupakan faktor yang perlu dieksplorasi dalam kaitannya dengan studi ini. Melalui peningkatan terhadap faktor-faktor tersebut maka diharapkan intensi masyarakat untuk melakukan kesiapsiagaan dapat pula meningkat.

Sementara itu, teknik intervensi yang digunakan adalah strategi *community capacity enhancement (CCE)* dan komunikasi risiko. *Community capacity enhancement* merupakan strategi yang difokuskan pada usaha untuk memobilisasi aset/sumber daya komunitas dalam rangka menyelesaikan masalah ataupun meningkatkan kapasitas komunitas tersebut (Delgado, 2000). Peneliti menggunakan CCE dalam rangka mencari aset komunitas yang dapat diberdayakan dan ditingkatkan kapasitasnya untuk menyelesaikan problem kebakaran. Salah satu aset tersebut adalah organisasi sosial yang ada di komunitas.

Teknik lainnya adalah komunikasi risiko, yaitu proses sosial dalam rangka memberikan informasi tentang suatu bahaya dan mempengaruhi masyarakat untuk melakukan perubahan perilaku serta berpartisipasi terhadap isu tersebut (Rohman, 1999, 2000). Komunikasi risiko penting digunakan untuk mendesain dan mengevaluasi informasi tentang suatu bahaya. Keberhasilan dari komunikasi risiko tidak hanya ditentukan oleh faktor isi dan konteks pesan tapi juga oleh faktor-faktor psikososial yang justru memiliki peran penting dalam mempengaruhi proses perubahan perilaku

## **1.2. Tujuan**

Aktivitas intervensi berbasis riset ini bertujuan agar komunitas dapat memiliki kemampuan untuk melakukan pertolongan pertama bagi komunitasnya sendiri dan menghindari meluasnya dampak kebakaran jika terjadi kebakaran di wilayahnya. Agar pengetahuan tersebut tidak menjadi pemahaman

pribadi maka perlu digunakan strategi pemberdayaan (empowerment) melalui pengorganisasian kelompok siaga lokal yang diharapkan dapat menjadi inisiator di komunitas. Kelompok siaga tersebut diharapkan tidak hanya dapat bertindak secara efektif ketika terjadi kebakaran. Namun, dalam jangka panjang dapat pula menjadi sumber daya lokal dalam mengembangkan rencana-rencana pencegahan bahaya kebakaran melalui aktivitas pengurangan kerentanan di masyarakat.

Membangun kesiapsiagaan lokal dalam jangka pendek juga memiliki berbagai hambatan. Menurut Paton, Kelly, Burgelt, & Doherty (2006) kesiapsiagaan terhadap kebakaran sangat tergantung pada adanya intensi untuk melakukan persiapan (intention to prepare). Melalui peningkatan ataupun penguatan terhadap faktor-faktor dalam internsi tersebut diharapkan komunitas dapat meningkatkan kesiapsiagaan secara nyata.

## 2. METODOLOGI

### 2.1 Tempat dan waktu pelaksanaan intervensi

Untuk kebutuhan penelitian ini, peneliti memilih kelurahan Manggarai tepatnya RW 04 mengingat wilayah tersebut merupakan salah satu wilayah yang rawan terhadap bahaya kebakaran. RW 04 kelurahan Manggarai terdiri atas 16 RT dengan jumlah penduduk kurang lebih 3727 jiwa atau sekitar 1031 KK (data dari RW 04 bulan Agustus 2006). Data BPS Kodya Jakarta Selatan (2005) menunjukkan bahwa kelurahan RW 04 memiliki wilayah kumuh yang cukup luas dibandingkan RW lainnya yaitu seluas 5,4 ha. Selain itu, sebanyak 2296 orang penduduk tinggal di wilayah kumuh dengan jumlah kepala keluarga yang menetap di wilayah tersebut sebesar 669 KK. Hal ini menunjukkan lebih dari 50 % penduduk tinggal di wilayah kumuh. Sebagian besar masyarakat RW 04 bekerja sebagai

pedagang dan buruh kasar.

RW 04 juga telah beberapa kali mengalami peristiwa kebakaran (3 kali dalam kurun waktu 1980 – 1986 dan 4 kali dalam kurun waktu 2003 -2006) bahkan pada tahun 2003 terjadi kebakaran besar di wilayah tersebut yang mengakibatkan lebih dari 800 KK kehilangan tempat tinggal. Berikut ini disajikan data kejadian kebakaran di RW 04.

### 2.2 Target kelompok intervensi

Target kelompok intervensi adalah anggota Tim Peduli Lingkungan (TPL) yang merupakan wadah representatif dari warga RW 04 dan memiliki kapasitas dalam melakukan berbagai aksi sosial. Jumlah anggota TPL aktif adalah 20 orang.

### 2.3 Prosedur intervensi dan metode pengumpulan data

- *Studi baseline*

Studi baseline dilakukan dengan menggunakan metode *Vulnerabilities and Capacities Assessment* (VCA), yaitu metode asesmen terhadap kerentanan dan kapasitas komunitas yang dikembangkan untuk membantu peneliti dalam memahami kerentanan masyarakat terhadap bencana (de Dios). Dengan mengetahui kondisi ini maka proses penyusunan program akan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat dalam rangka mengurangi kerentanan.

Untuk melakukan asesmen tersebut digunakan berbagai teknik pengumpulan data yang bersifat kualitatif sebagaimana yang digunakan dalam aktivitas *participatory rural/urban appraisal* meliputi pengumpulan data sekunder, wawancara semi terstruktur, observasi, *hazard mapping*, dan *focus group discussion*. Asesmen tersebut menghasilkan matriks VCA yang digunakan untuk menyusun problem tree dan objective tree program intervensi

Tabel 1. Kejadian kebakaran di RW 04 (2003 – 2006)

Tanggal Kejadian	Penyebab	Estimasi Kerugian /Korban	Daerah Terbakar
14 Juli 2005	Korsleting listrik	2 juta	6 m <sup>2</sup>
6 Mei 2005	Korsleting listrik	10 juta	24,5 m <sup>2</sup>
28 Juli 2003	Puntung rokok	- 35 KK kehilangan rumah	3500 m <sup>2</sup>
6 Maret 2003	Lilin yang dimainkan anak kecil	- 875 KK kehilangan rumah - 800 rumah, 1 mesjid, & 1 langgar terbakar - 10 orang luka	80.000 m <sup>2</sup>

Sumber : Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan 2003 – 2006

kesiapsiagaan kebakaran berbasis komunitas.

Rancangan program intervensi disusun dengan melakukan analisis terhadap *problem* dan *objective tree*. Dengan memperhatikan aspek-aspek yang menjadi faktor penyebab masalah dan *objective tree* yang telah dibuat maka peneliti memfokuskan intervensi pada aspek kesadaran masyarakat tentang kesiapsiagaan kebakaran komunitas. Aspek tersebut diuraikan melalui peningkatan pengetahuan dan skill, mengubah outcome expectancy, dan peningkatan intensi terhadap kesiapsiagaan kebakaran komunitas. Adapun indikator pra-intervensi yang akan menjadi acuan perubahan dalam proses intervensi terdapat pada tabel 1 berikut ini.

Dengan mengacu pada hal-hal di atas maka program intervensi dapat digambarkan dalam kerangka strategi komunikasi risiko dan peningkatan kapasitas komunitas. Berdasarkan hasil baseline maka strategi komunikasi risiko yang perlu diperhatikan adalah pada upaya peningkatan :

1. pengetahuan tentang penanggulangan kebakaran
2. informasi tentang manfaat kesiapsiagaan kebakaran komunitas melalui praktik/latihan perencanaan

• *Implementasi dan evaluasi program intervensi*

Tahapan dalam pelaksanaan program intervensi meliputi :

1. Asesmen yang dimulai pada bulan November 2006 – April 2007
2. *Community meeting/FGD* dilakukan pada tanggal 29 April 2007
3. Pelatihan dan penyuluhan kesiapsiagaan kebakaran pada tanggal 27 Mei, 2, dan 9 Juni 2007 bekerja sama dengan Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan dan Bulan Sabit Merah Indonesia cabang Jakarta Pusat
4. Workshop kesiapsiagaan kebakaran berbasis

komunitas berlangsung pada tanggal 3 Juni 2007 bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Jakarta Selatan

5. Pembimbingan perencanaan aktivitas dilakukan tanggal 9, 23, dan 27 Juni 2007

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Laporan Intervensi

Berdasarkan hasil intervensi yang dilakukan peneliti maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Terbentuknya tim siaga kebakaran di komunitas sebagai fungsi baru dari Tim Peduli Lingkungan. Peningkatan pengetahuan masyarakat dalam kesiapsiagaan kebakaran yang ditunjukkan melalui perbedaan mean pada uji nilai *t* kuesioner pre dan post test. Hasil uji paired sample *t* test pada hasil pre dan post test yang menunjukkan perbedaan mean sebesar -40,5263 (Mean Pre Test = 51,05; Mean Post Test = 91,57). Perbedaan tersebut signifikan berdasarkan uji signifikansi dengan nilai *t* sebesar -18,205 (dengan *df* = 18; tingkat kepercayaan 95 %). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyuluhan tersebut cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan peserta.
2. Adanya perubahan outcome expectancy dan intensi terhadap kesiapsiagaan yang ditunjukkan melalui perubahan perilaku kesiapsiagaan yang spesifik pasca intervensi. Hal ini dilakukan dengan memberikan kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan workshop. Kuesioner berisi pernyataan tentang hal-hal spesifik yang dilakukan warga dalam mempersiapkan diri menghadapi bahaya kebakaran (Tabel 2).
3. Penyebaran informasi tentang kesiapsiagaan kebakaran secara nonformal serta kampanye waspada bahaya kebakaran melalui penyebaran stiker.

Tabel 2. Indikator pra-intervensi

ASPEK	INDIKATOR PRA-INTERVENSI
Intensi terhadap kesiapsiagaan kebakaran komunitas	- Belum ada keinginan untuk membentuk kelompok siaga kebakaran - Minimnya persiapan yang spesifik untuk menghadapi kebakaran
Pengetahuan tentang kesiapsiagaan kebakaran	- Minimnya pengetahuan dan skill tentang cara menghadapi kebakaran
Outcome expectancy terhadap kesiapsiagaan kebakaran berbasis komunitas	- Minimnya pengetahuan tentang manfaat kesiapsiagaan komunitas - Belum memiliki informasi tentang kesiapsiagaan

### 3.2. Artikel Ulasan

Frekuensi kebakaran di Jakarta yang sangat tinggi merupakan problem yang memerlukan penanganan secara komprehensif. Menempatkan problem tersebut dalam kategori insidental tidak relevan lagi dilakukan karena walaupun tidak memiliki pola waktu tertentu namun pola-pola kerentanannya dapat diidentifikasi. Dengan memperhatikan besarnya kerugian, ancaman bahaya, tingkat kerentanan, dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat maka selayaknya peristiwa kebakaran dikategorikan sebagai bentuk bencana di masyarakat. Hal ini memberikan peluang untuk memecahkan persoalan kebakaran menjadi lebih komprehensif.

Menurut Hall & Cote (2003) dalam pencegahan kebakaran proses prevensi akan menjadi lebih efektif jika dilakukan dengan mempertimbangkan interaksi antara sumber panas, sumber bahan bakar, & perilaku manusia. Ketiga komponen ini harus dilihat sebagai elemen-elemen yang saling berhubungan, sehingga intervensi yang terbaik dilakukan dengan melibatkan ketiga elemen tersebut. Misalnya kegiatan preventif dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi antara berbagai aktivitas seperti desain ulang produk yang dapat mencegah sumber api & bahan bakar, melakukan perubahan peraturan terkait dengan pencegahan kebakaran di masyarakat, menciptakan kode, konsesus, dan standar yang diperlukan terkait sumber penyebab kebakaran maupun perilaku, adanya dukungan dari pihak industri untuk mengubah produk agar lebih aman kebakaran, maupun menggerakkan konsumen agar memilih produk yang aman. Selain itu di Amerika Serikat, misalnya, telah terdapat berbagai standar label dan instruksi kepada konsumen untuk tidak membuang barang agar *fire-safe* serta aktivitas *fire prevention week* yang dilakukan setiap bulan Oktober oleh *National Fire Protection Association (NFPA)*. Namun, banyak produk yang sudah didesain dengan baik agar *fire-safe* tetap dapat menimbulkan kebakaran karena penggunaannya tidak

diberi pengetahuan tentang pentingnya perilaku *fire-safe*. Oleh karena itu, strategi intervensi perlu memperhatikan pendidikan kepada masyarakat.

Program berbasis masyarakat merupakan strategi yang telah lama dikembangkan di berbagai negara dengan tingkat frekuensi kebakaran yang tinggi. Di Amerika Serikat strategi ini merupakan salah satu pendekatan yang efektif untuk mengurangi frekuensi kebakaran (Appy & Compton, 2003). Menurut Strother & Buchbinder (1980) penentuan program sesuai kebutuhan komunitas lokal dan pelibatan aktif komunitas merupakan hal yang penting untuk dilakukan.

Ket. N = 17

Keberhasilan program berbasis masyarakat untuk mengurangi angka kejadian kebakaran dibuktikan melalui penelitian oleh Kristantio (2006) yang dilakukan di Galur, Jakarta Pusat. Menurut Kristantio (2006), Galur telah menjadi daerah yang relatif aman dari bahaya kebakaran jika dinilai dari berkurangnya frekuensi kebakaran di wilayah tersebut. Dalam penelitiannya, Kristantio (2006) menemukan bahwa salah satu faktor utama keberhasilan tersebut adalah tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam menanggulangi kebakaran di wilayah Galur. Hal ini menunjukkan bahwa program berbasis masyarakat merupakan kegiatan yang perlu diperkuat dan dikembangkan untuk mengatasi permasalahan kebakaran. Di sisi lain, berdasarkan penelitian Kristantio (2006), faktor persepsi merupakan aspek yang penting dalam penanggulangan kebakaran. Namun dalam konteks kesiapsiagaan, persepsi terhadap risiko sendiri tidak cukup untuk menjadi prediktor yang dapat menggerakkan komunitas melakukan kesiapsiagaan. Menurut Paton, Kelly, & Doherty (2006), kesiapsiagaan ditentukan oleh faktor-faktor lainnya meliputi *outcome expectancy*, *sense of community*, dan *action coping*. Hal ini dapat dilihat pada warga RW 04. Berdasarkan hasil baseline, ditemukan bahwa

Tabel 3. Item perilaku kesiapsiagaan

Perilaku	Sebelum	Sesudah
Menyiapkan karung/handuk basah di dapur	17 %	94 %
Menyusun rencana darurat dalam keluarga jika terjadi kebakaran	17 %	94 %
Memiliki obat-obatan P3K	94 %	94 %
Melatih keterampilan memadamkan api	0 %	82 %
Memiliki persediaan air khusus jika terjadi kebakaran	11 %	47 %

komunitas RW 04 memiliki critical awareness maupun persepsi terhadap risiko yang cukup baik terhadap bahaya kebakaran di lingkungan tempat tinggalnya. Namun hal tersebut tidak mendorong warga untuk melakukan aktivitas kesiapsiagaan spesifik dalam menghadapi bahaya kebakaran.

Ketiadaan penelitian yang komprehensif tentang peran faktor-faktor intensi di masyarakat mungkin menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya program kesiapsiagaan kebakaran berbasis komunitas yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta. Dalam kasus Galur, partisipasi dan persepsi mungkin menjadi faktor dominan karena memang kedua variabel tersebut yang diteliti secara khusus oleh Kristantio (2006). Pelaksanaan program umumnya tidak didahului dengan studi yang layak tentang komunitas. Padahal dengan mengetahui hal tersebut maka kita baru dapat menentukan model komunikasi risiko yang sesuai dengan komunitas.

Namun demikian, penggunaan model kognitif-sosial terkait intensi terhadap kesiapsiagaan juga memerlukan penelitian lebih dalam. Dalam proses intervensi di RW 04, model ini digunakan untuk mengelaborasi faktor-faktor intensi tersebut di masyarakat. Asumsinya, dengan mengaktifkan faktor-faktor intensi yang disimpulkan masih lemah maka intensi untuk melakukan kesiapsiagaan dapat menjadi lebih faktual. Namun, peneliti belum menemukan penelitian yang menggunakan model kognitif-sosial ini pada komunitas di Indonesia. Oleh karena itu, penggunaan model ini akan lebih baik jika didahului dengan penelitian kuantitatif untuk memprediksi faktor yang relevan dalam penelitian maupun di komunitas.

Model kognitif-sosial pada dasarnya diperlukan untuk membantu merencanakan bentuk komunikasi risiko yang sesuai dengan masyarakat. Di RW 04, komunikasi risiko ditekankan pada pengembangan kesiapsiagaan terhadap bahaya serta manajemen yang perlu dibangun melalui tim siaga lokal. Dalam konteks yang lebih luas, negara yang sangat rawan bencana seperti Indonesia sangat membutuhkan desain komunikasi risiko yang tepat agar program-program intervensi dapat berjalan dengan efektif. Hal ini terkait dengan adanya limitasi dana yang diperuntukkan bagi aktivitas edukasi tentang bencana di masyarakat.

Pembentukan tim siaga lokal merupakan langkah awal dari berbagai aktivitas lainnya yang dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dari bahaya kebakaran. Tim ini perlu

merencanakan aktivitas-aktivitas lanjutan yang perlu dilakukan baik bagi kelangsungan kelompok maupun warga lainnya. Untuk itu, dalam masa mendatang tim siaga diharapkan dapat menyusun manajemen kesiapsiagaan kebakaran di komunitas misalnya prosedur dan latihan evakuasi maupun sistem peringatan dini di komunitas.

Berbagai bentuk program intervensi yang lebih difokuskan pada perubahan struktural seperti aspek ekonomi dan fisik perlu dilakukan agar dapat mengurangi tingkat kerentanan, seperti penggunaan listrik tenaga mikro hidro sebagai pengganti tenaga listrik dari PLN. Penggunaan teknologi ini dapat membantu mengurangi beban finansial pemakaian listrik serta menghindari perilaku konsumsi listrik yang tidak aman dan ilegal. Namun, pelaksanaan program tersebut juga perlu memperhatikan penerimaan masyarakat serta kesiapan sumber pendukung teknologi ini.

Appy & Compton (2003) menyebutkan strategi "Five Es" sebagai strategi utama yang komprehensif dalam melibatkan komunitas untuk menanggulangi masalah kebakaran. Menurut Appy & Compton (2003)<sup>18</sup> masalah kebakaran komunitas hanya dapat diselesaikan secara tuntas jika melibatkan lima unsur, yaitu pendidikan (*education*), pemberdayaan (*empowerment*), perbaikan lingkungan tempat tinggal (*environment*), pengembangan standar keamanan melalui penegakan hukum (*enactment*), dan pengembangan riset perilaku (*evaluation*). Integrasi antara kelima elemen tersebut akan memberikan hasil yang efektif dalam menanggulangi masalah kebakaran.

Pemaknaan komprehensif juga memberikan arti bahwa permasalahan kebakaran tidak hanya menjadi tanggung jawab instansi pemadam kebakaran dan masyarakat namun tapi juga para pembuat kebijakan, akademisi serta intervensionis untuk dapat menentukan program dan target perilaku yang tepat. Hal ini mengisyaratkan bahwa hasil yang optimal dari kegiatan intervensi seperti ini memerlukan proses penyusunan program jangka panjang melalui berbagai kajian yang lebih dalam serta melibatkan strategi yang komprehensif.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan evaluasi kegiatan intervensi yang telah dilakukan maka dapat diperoleh.

beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Program intervensi kesiapsiagaan kebakaran berbasis komunitas yang dilakukan di RW 04 Kelurahan Manggarai telah berhasil membantu komunitas dalam mempersiapkan diri menghadapi bahaya kebakaran melalui :
  - peningkatan pengetahuan peserta kegiatan dalam menanggulangi dan mempersiapkan diri menghadapi kebakaran di wilayahnya
  - pembentukan tim siaga kebakaran lokal.
  - penyebaran informasi nonformal
2. Kegiatan berbasis masyarakat yang melibatkan masyarakat dari tahap perencanaan hingga implementasi merupakan pendekatan yang penting untuk mendukung keberhasilan program kesiapsiagaan kebakaran.
3. Untuk menangani permasalahan kebakaran di masyarakat maka perlu dilakukan asesmen yang komprehensif agar dapat merencanakan bentuk program yang efektif di masyarakat tersebut
4. Perilaku kesiapsiagaan perlu memperhatikan aspek intensi terhadap kesiapsiagaan dan faktor-faktor yang mendasarinya. Dengan mengetahui faktor-faktor yang berperan dalam intensi maka perubahan perilaku spesifik akan lebih mudah untuk dilakukan. Untuk RW 04, faktor intensi yang mendukung adalah *sense of community dan critical awareness*. Sementara itu, aspek *outcome expectancy* dan *action coping* merupakan aspek-aspek yang perlu ditingkatkan dalam rangka mensukseskan program intervensi.

#### 4.2. Saran

Program intervensi kesiapsiagaan kebakaran berbasis komunitas ini merupakan sebuah langkah kecil untuk menciptakan lingkungan yang aman dari bahaya kebakaran. Walaupun kegiatan ini telah mencapai beberapa keberhasilan yang dapat terukur namun proses ini masih memerlukan berbagai revisi.

Untuk itu, dalam pelaksanaan aktivitas intervensi selanjutnya maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Untuk melakukan perbandingan tentang ketepatan faktor-faktor dalam intensi terhadap kesiapsiagaan maka metode kualitatif perlu dikombinasikan dengan metode kuantitatif dan analisis statistik (misalnya regresi). Hal ini dilakukan agar kesimpulan yang diambil dapat lebih teruji. Selain itu, untuk menguji

hasil yang telah diperoleh dapat pula dilakukan perbandingan dengan anggota masyarakat lain yang tidak mengikuti kegiatan intervensi agar dapat diperoleh kesimpulan dari hasil intervensi yang lebih dapat digeneralisasi.

2. Intervensi perlu dilakukan secara khusus pada kelompok yang paling berisiko (misalnya anak-anak dan wanita) karena memiliki karakteristik yang berbeda dan memerlukan pendekatan yang spesifik pada kelompok-kelompok tersebut.
3. Perlunya aktivitas dan simulasi yang lebih real untuk mengimplementasikan rencana aksi komunitas dalam menghadapi bahaya kebakaran. Hal ini penting dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran dan melatih keterampilan menghadapi peristiwa kebakaran yang tidak dapat diprediksikan.
4. Evaluasi yang berkesinambungan untuk melihat dampak jangka panjang dari program perlu dilakukan agar dapat mengevaluasi program secara menyeluruh.
5. Komunikasi risiko yang didasarkan atas asesmen yang tepat perlu dikemas dalam program ataupun aktivitas yang lebih kreatif. Untuk itu dibutuhkan berbagai ide baru yang realistis untuk diterapkan agar dapat memberi cara pandang baru dalam mengatasi permasalahan kebakaran komunitas.
6. Bentuk program intervensi alternatif yang difokuskan pada aspek struktural juga perlu dilakukan agar dapat mengatasi problem kebakaran secara lebih komprehensif.
7. Untuk memberikan hasil yang positif dan lebih efektif maka diperlukan kerja sama secara komprehensif dengan berbagai stakeholder baik dari pemerintah daerah, dinas pemadam kebakaran, maupun lembaga swadaya masyarakat. Kerja sama tersebut tidak hanya dalam bentuk dukungan informasi dan fasilitas tapi juga kemauan bertindak secara proaktif untuk menjadi mitra dari komunitas hingga mampu membentuk komunitas yang memiliki ketahanan lingkungan secara mandiri.
8. Penelitian lain terkait efektivitas komunikasi risiko, intensi terhadap kesiapsiagaan, serta perilaku manusia dalam peristiwa kebakaran perlu dilakukan di Indonesia mengingat pentingnya menemukan solusi dari permasalahan ini. Selama ini, penelitian-penelitian tentang hal-hal tersebut di atas